



KONSEP PENGEMBANGAN MINAPOLITAN DI WILAYAH BAGIAN SELATAN KABUPATEN CIANJUR

Ramdan Sobari¹, Maulana Yusuf Abdulloh², Siti Rismayanti³, Miqdad Thariq Al-Ghiffari⁴, Ika Mustikawati⁵

¹²³⁴⁵ Program Studi Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Teknik Industri, Universitas Sali Al-Aitaam

*Correspondence e-mail: ramdansobari683@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Cianjur memiliki peran strategis sebagai daerah penyangga dan penghubung antar kawasan metropolitan Jakarta dan Bandung. Secara fungsional, wilayah ini terbagi menjadi Wilayah Utara (agropolitan), Tengah (pusat pemerintahan dan perdagangan), dan Selatan (pertanian dan wisata pantai). Namun, wilayah bagian selatan Kabupaten Cianjur masih menghadapi tantangan ketimpangan infrastruktur, aksesibilitas rendah, kerentanan bencana pesisir, serta ketergantungan pada sektor ekonomi subsisten. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep pengembangan wilayah Minapolitan yang selaras dengan prinsip perencanaan wilayah berkelanjutan melalui pendekatan aspek tata ruang, ekonomi lokal, sosial budaya, dan lingkungan. Menggunakan pendekatan kuantitatif-kualitatif dengan analisis spasial dan ekonomi wilayah (Location Quotient dan Shift Share), penelitian ini menemukan bahwa sektor perikanan memiliki potensi sebagai penggerak ekonomi utama di wilayah selatan. Konsep pengembangan Minapolitan diarahkan melalui pembentukan struktur ruang berjenjang: menetapkan Kecamatan Cidaun sebagai Minapolitan Centre dengan dukungan PPI Jayanti, Kecamatan Sindangbarang dan Agrabinta sebagai Minapolitan District, serta desa-desa pesisir sebagai hinterland produksi. Implementasi konsep ini diwajibkan terintegrasi dengan strategi mitigasi bencana pesisir, pemantapan jalur evakuasi, dan pelestarian sempadan pantai untuk menjamin pembangunan yang tangguh, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

Kata kunci: Minapolitan, Pengembangan Wilayah, Kabupaten Cianjur, Rantai Nilai Perikanan, Mitigasi Bencana.

Abstract

Cianjur Regency plays a strategic role as a buffer zone and a link between the Jakarta and Bandung metropolitan areas. Functionally, this region is divided into the North (agropolitan), Central (government and trade centers), and South (agriculture and coastal tourism). However, the southern part of Cianjur Regency still faces challenges such as infrastructure inequality, low accessibility, coastal disaster vulnerability, and dependence on the subsistence economic sector. This study aims to formulate a Minapolitan regional development concept that aligns with the principles of sustainable regional planning through an approach to spatial planning, local economics, socio-cultural aspects, and the environment. Using a quantitative-qualitative approach with spatial and regional economic analysis (Location Quotient and Shift Share), this study found that the fisheries sector has the potential to be a major economic driver in the southern region. The Minapolitan development concept is directed through the formation of a tiered spatial structure: establishing Cidaun District as the Minapolitan Center with the support of PPI Jayanti, Sindangbarang and Agrabinta Districts as Minapolitan Districts, and coastal villages as production hinterlands. The implementation of this concept must be integrated with coastal disaster mitigation strategies, strengthening evacuation routes, and preserving coastal boundaries to ensure resilient, sustainable, and highly competitive development.

Keywords: Minapolitan, Regional Development, Cianjur Regency, Fisheries Value Chain, Disaster Mitigation.



PENDAHULUAN

Wilayah merupakan kesatuan ruang geografis yang memiliki batas-batas tertentu dan terdiri dari berbagai unsur fisik, sosial, ekonomi, serta sistem interaksi antarunsur tersebut [1]. Dalam konteks perencanaan, wilayah dipahami sebagai satu kesatuan geografis yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dan fungsional. Sebagai upaya terencana untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas suatu ruang, pengembangan wilayah mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya lokal, penataan ruang, konektivitas, dan penguatan kelembagaan demi mewujudkan pendekatan pembangunan yang terintegrasi antara aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata ruang. Pemanfaatan ruang ini selaras dengan tanggung jawab moral manusia sebagai pengelola bumi untuk menjaga keseimbangan ekologis dan mencegah eksploitasi yang merusak daya dukung lingkungan.

Kabupaten Cianjur merupakan wilayah strategis nasional di Provinsi Jawa Barat yang berfungsi sebagai daerah penyangga (*buffer zone*) dan penghubung utama antara dua kawasan metropolitan besar, yaitu Jakarta dan Bandung [2]. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020, bagian utara wilayah ini masuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jabodetabekpunjur yang memegang peran vital dalam pengendalian pertumbuhan perkotaan dan pelestarian kawasan hulu DAS Ciliwung serta Citarum. Secara fungsional dan spasial, melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Cianjur 2024-2044, daerah ini dibagi menjadi tiga wilayah pengembangan utama dengan karakter, isu, dan prioritas yang berbeda, yaitu Wilayah Utara (fokus agropolitan dan pariwisata), Wilayah Tengah (pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa), serta Wilayah Selatan.

Perbedaan Wilayah ini menunjukkan adanya ketimpangan spasial yang nyata, terutama di wilayah bagian selatan Kabupaten Cianjur. Dibandingkan dengan wilayah utara dan tengah yang padat secara urban dan infrastruktur, wilayah selatan dicirikan oleh karakteristik fisik berupa dataran rendah dan kawasan pesisir luas yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Wilayah selatan ini mencakup kecamatan pesisir potensial seperti Kecamatan Cidaun, Kecamatan Agrabinta dan Sindangbarang yang keseluruhannya memiliki luas sebesar 65.310,08 Hektar. Secara geologis dan hidrologis, wilayah pesisir selatan mengalirkan sub-DAS besar seperti sub-DAS Cibuni-Cilaku langsung menuju Samudra Hindia, yang menyimpan kelimpahan sumber daya air permukaan sekaligus potensi kelautan yang masif.

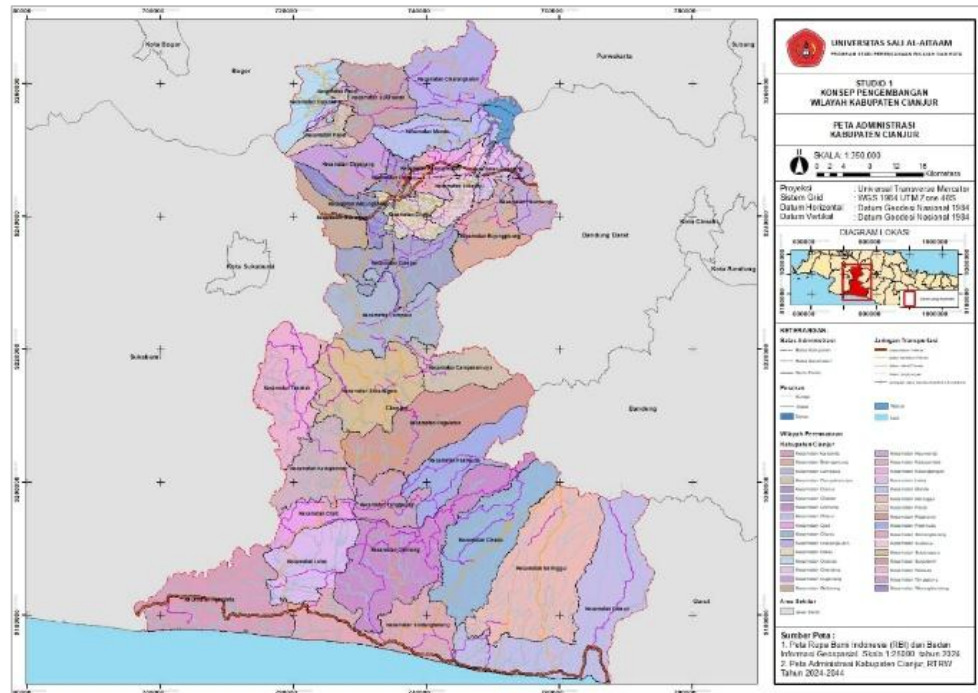
Meskipun wilayah bagian selatan Kabupaten Cianjur memiliki keunggulan komparatif pada potensi pariwisata pantai, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya pesisir, wilayah ini dihadapkan pada rentetan isu strategis yang menghambat kemandirian ekonomi masyarakat. Tantangan utama di wilayah ini mencakup keterbatasan infrastruktur dasar, aksesibilitas transportasi regional yang rendah yang memisahkan sentra produksi dari pasar regional, serta struktur ekonomi yang didominasi oleh kegiatan subsisten bernilai tambah rendah. Masalah ini diperparah oleh kerentanan bencana alam yang sangat tinggi di pesisir selatan. Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), wilayah selatan merupakan wilayah paparan utama bencana banjir kategori bahaya tinggi, bahaya banjir bandang di sepanjang aliran sungai, serta kerentanan tinggi terhadap bencana tsunami, terutama di Kecamatan Agrabinta, Sindangbarang, dan Cidaun.

Sebagai solusi terintegrasi atas problematika spasial dan ekonomi tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur tahun 2024-2044 telah menetapkan arah kebijakan jangka panjang melalui implementasi Konsep Pengembangan Minapolitan di Wilayah Bagian Selatan Kabupaten Cianjur. Pendekatan Minapolitan merupakan konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan untuk mempercepat pertumbuhan melalui keterkaitan fungsional berjenjang antara sentra produksi (*hinterland*), pusat distrik pengolahan, dan pusat pemasaran (*Minapolitan Centre*). Kebijakan ini didukung oleh penetapan Kecamatan Cidaun sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Cidaun-Rancabuaya, penyiapan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Jayanti di Kecamatan Cidaun, serta Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kecamatan Sindangbarang.

Namun, integrasi tata ruang operasional, kesiapan komoditas unggulan perikanan, keterbatasan prasarana dasar, dan mitigasi risiko bencana pesisir di lapangan masih memerlukan kajian akademik yang mendalam. Dibutuhkan strategi pengembangan minapolitan yang adaptif terhadap risiko

lingkungan, mampu mengonversi sektor perikanan tradisional ke agroindustri pengolahan bernilai ekonomi tinggi, serta bersinergi dengan prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya SDG 8 (Pertumbuhan Ekonomi Inklusif), SDG 11 (Komunitas Berkelanjutan), dan SDG 14 (Kehidupan Bawah Air).

Oleh karena itu, artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan konsep pengembangan kawasan minapolitan yang selaras dengan daya dukung lahan serta kelestarian sumber daya alam di wilayah bagian selatan Kabupaten Cianjur.



Gambar 1 Peta Administrasi Kabupaten Cianjur
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2026

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengembangan Minapolitan

Teori Minapolitan merupakan salah satu konsepsi pembangunan ekonomi berbasis kawasan yang diterapkan di Indonesia, dengan fokus utama pada sektor kelautan dan perikanan [3]. Secara etimologis, istilah Minapolitan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu "Mina" yang berarti ikan (merekpresentasikan sektor kelautan dan perikanan) dan "Politan" yang berasal dari kata *polis* yang berarti kota atau kawasan perkotaan. Dengan demikian, secara harfiah Minapolitan dapat diartikan sebagai "Kota Perikanan" atau "Kawasan Perikanan" yang memiliki karakter perkotaan dalam hal kelengkapan fasilitas penunjang pelayanan jasa ekonomi dan sarannya.

Secara konseptual, pengembangan kawasan Minapolitan bertumpu pada pendekatan wilayah (*region-based approach*) [4]. Tujuan utama dari konsep ini adalah untuk mempercepat pengembangan sentra-sentra produksi perikanan yang memiliki potensi tinggi, meningkatkan volume produksi, produktivitas, serta kualitas produk kelautan dan perikanan agar memenuhi standar mutu keamanan pangan dunia yang berdaya saing tinggi di pasar global. Melalui akselerasi sektor perikanan ini, Minapolitan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan secara adil dan merata.

Berdasarkan landasan teoritis pengembangan wilayah, kawasan Minapolitan harus dirancang dan dioperasikan dengan mematuhi empat prinsip dasar utama, yaitu:



1. Terintegrasi: Prinsip ini menekankan pentingnya menciptakan keterkaitan fungsional serta hierarki keruangan antara sentra produksi perikanan (*desa/hinterland*), kawasan pengolahan industri, dan pusat pemasaran dalam satu kesatuan sistem kawasan yang utuh, seimbang, dan selaras. Integrasi ini wajib mencakup rantai pasok dari sektor hulu (penyediaan input/sarana produksi) hingga sektor hilir (agroindustri pengolahan dan jaringan pemasaran).
2. Efisiensi: Mengedepankan minimasi biaya operasional dan optimalisasi waktu perjalanan, terutama dalam manajemen rantai pasok dan sistem logistik perikanan. Prinsip efisiensi ini menjadi prasyarat krusial untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dan daya saing produk perikanan lokal di tingkat regional maupun internasional.
3. Berkualitas: Mendorong penerapan inovasi teknologi dan standarisasi ketat dalam sistem produksi serta pengolahan produk kelautan. Hal ini bertujuan agar seluruh komoditas yang dihasilkan memenuhi standar mutu yang tinggi, aman dikonsumsi, serta memiliki nilai tambah ekonomis yang optimal.
4. Percepatan (Akselerasi Tinggi): Mendorong pertumbuhan kawasan melalui kebijakan terobosan (*breakthrough*) dan aplikasi inovasi modern. Langkah ini ditujukan untuk memangkas hambatan birokrasi dan teknis guna mencapai target produksi nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dalam jangka waktu yang lebih cepat.

Untuk menghindari ketimpangan spasial dan memastikan aliran distribusi ekonomi berjalan lancar, konsep Minapolitan mengadopsi model struktur tata ruang berjenjang (*hierarchical spatial structure*), yang terdiri atas tiga komponen spasial sebagai berikut:

1. Pusat Minapolitan (*Minapolitan Centre*): Berperan sebagai simpul utama perdagangan, pengumpul, dan pemasaran makro yang berorientasi skala regional, nasional, hingga ekspor internasional. Secara fisik, pusat ini dicirikan oleh aksesibilitas transportasi terbaik dan wajib dilengkapi oleh sarana prasarana perikanan skala besar, seperti pelabuhan perikanan utama, pabrik industri pengolahan modern, dan fasilitas pergudangan berpendingin (*cold storage*).
2. Distrik Minapolitan (*Minapolitan District*): Berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah dengan tingkat ordo fungsional yang lebih rendah daripada *centre*. Distrik ini ditandai oleh keberadaan pasar-pasar ikan lokal serta ketersediaan fasilitas pengumpulan atau industri pengolahan skala kecil hingga menengah.
3. Daerah Belakang (*Hinterland*): Merupakan satuan kawasan perikanan di tingkat perdesaan yang berfungsi sebagai basis produksi atau penyedia bahan baku utama. Kawasan ini menjadi tempat pelaksanaan aktivitas budidaya perikanan maupun perikanan tangkap secara mandiri, yang terhubung erat secara fungsional ke tingkat distrik maupun pusat minapolitan.

Melalui pembagian struktur ruang berjenjang ini, teori Minapolitan berupaya mewujudkan pembangunan inter-regional yang berimbang. Hal ini memperkuat hubungan simbiotik antara kawasan perkotaan dan perdesaan, di mana desa memegang peran vital sebagai penyedia bahan baku mentah, sementara kota berfungsi sebagai pusat pengolahan bernilai tambah, pusat distribusi pemasaran, serta penyedia jasa pelayanan logistik penunjang perikanan.

B. Struktur Kawasan Minapolitan

Pengembangan kawasan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis Minapolitan diatur melalui pendekatan regional yang menuntut keterpaduan fungsional antara pusat pertumbuhan perkotaan dan unit produksi di perdesaan pesisir [5]. Sesuai dengan prinsip penataan ruang wilayah, struktur kawasan Minapolitan menggunakan pendekatan hierarki berjenjang untuk memaksimalkan efisiensi rantai pasok logistik dari sektor hulu ke hilir. Implementasi spasial struktur kawasan ini dibagi menjadi tiga komponen utama, yaitu:

1. Pusat Minapolitan (*Minapolitan Centre*)

Pusat Minapolitan memegang posisi tertinggi dalam hierarki struktur ruang kawasan, yang berfungsi sebagai simpul utama untuk aktivitas perdagangan, pengumpulan produk, dan pemasaran berskala makro, baik untuk memenuhi rantai pasok regional, nasional, hingga orientasi ekspor internasional [6]. Wilayah yang ditetapkan sebagai *Minapolitan Centre* dicirikan oleh penyediaan jaringan konektivitas prasarana transportasi yang optimal dan mutlak harus dilengkapi dengan fasilitas

pelayanan teknis perikanan utama. Kelengkapan prasarana penunjang pada simpul ini meliputi pelabuhan perikanan utama, pangkalan industri pengolahan produk kelautan skala besar, hingga sarana penyimpanan berpendingin (*cold storage*).

Dalam konteks penataan ruang makro Kabupaten Cianjur, struktur ini dikorelasikan dengan kebijakan sistem pusat permukiman yang menetapkan kecamatan utama di wilayah selatan sebagai simpul regional. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Cianjur 2024-2044, Kecamatan Cidaun telah ditetapkan kedudukannya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Cidaun-Rancabuaya. Penetapan fungsional Cidaun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di pesisir selatan ini didukung secara teknis oleh rencana operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Jayanti di Kecamatan Cidaun serta rencana pembangunan Terminal Khusus Megatop. Hal ini menempatkan PKW Cidaun sebagai *Minapolitan Centre* yang bertugas mengolah dan mendistribusikan hasil laut menuju pasar regional yang lebih luas.

2. Distrik Minapolitan (*Minapolitan District*)

Distrik Minapolitan merupakan pusat pertumbuhan antara (*intermediary hub*) yang menempati hierarki ordo di tingkat bawah *Minapolitan Centre* [7]. Unit spasial ini berfungsi mengoordinasikan distribusi pengumpulan komoditas perikanan dari wilayah perdesaan basis produksi sebelum dikirimkan ke pusat pengolahan makro. Secara fungsional, distrik ini ditandai oleh keberadaan pasar-pasar ikan lokal, sub-terminal logistik, sarana pengisian bahan bakar nelayan, serta unit industri pengolahan hasil perikanan skala kecil dan menengah (agroindustri/UMKM).

Struktur *Minapolitan District* ini diintegrasikan ke dalam klasifikasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) wilayah selatan Kabupaten Cianjur. Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 7 Tahun 2024, Kecamatan Sindangbarang memegang peran penting sebagai PKL Wilayah Pesisir Selatan yang diperkuat dengan eksistensi Pelabuhan Pengumpulan Lokal Sindangbarang. Sementara itu, kecamatan penyangga sekitar pantai seperti Kecamatan Agrabinta diposisikan sebagai unit terminal penumpang dan logistik tipe C perikanan pesisir. Keberadaan jenjang distrik ini menjamin kelancaran pergerakan barang dan jasa ekonomi tanpa mengalami kendala aksesibilitas menuju simpul utama pantai selatan.

3. Satuan Kawasan Perikanan (*Hinterland*)

Hinterland merupakan satuan kawasan produksi berbasis perdesaan yang bertindak sebagai pemasok utama (*primary supplier*) bahan baku mentah perikanan bagi keberlangsungan industri di tingkat distrik maupun pusat kawasan [8]. Daerah belakang ini tumbuh sebagai desa-desa perikanan mandiri yang fokus pada aktivitas budidaya perikanan air tawar, tambak pesisir, maupun penangkapan ikan tradisional lepas pantai.

Berdasarkan kompilasi rencana pola ruang pesisir bagian selatan Kabupaten Cianjur, alokasi kawasan perikanan budidaya pesisir dialokasikan secara spesifik pada lahan potensial di Kecamatan Agrabinta, Kecamatan Cidaun, dan Kecamatan Sindangbarang. Untuk menjaga keberlanjutan pasokan komoditas perikanan dari *hinterland*, struktur ini wajib didukung oleh ketahanan prasarana hidrologi berupa pemantapan jaringan Daerah Irigasi (DI) dan mitigasi struktural di sepanjang sempadan sungai atau pantai selatan.

Sistem hidrologi sub-DAS selatan seperti aliran Sungai Cibuni, Sungai Cilaku, Sungai Cisadea, Sungai Ciujung, dan Sungai Cipandak yang mengalir memanjang dan bermuara langsung ke Samudra Hindia dimanfaatkan sebagai sumber air utama guna mendukung operasional tambak budidaya masyarakat desa. Penguatan keterkaitan fungsional antara desa perikanan (*hinterland*) sebagai produsen bahan mentah, dengan kota pantai (Cidaun-Sindangbarang) sebagai pengolah industri dan pemasar merupakan inti utama perwujudan konsep penataan ruang pesisir selatan yang berdaya saing, inklusif, dan tangguh guncangan lingkungan.

C. Minapolitan dan Penguatan Rantai Nilai Perikanan

1. Integrasi Sektor Basis dan Rantai Nilai Perikanan

Rantai nilai (*value chain*) perikanan dalam sistem Minapolitan mencakup totalitas interaksi hulu-hilir, mulai dari penyediaan input sarana produksi produksi perikanan, aktivitas penangkapan

dan budidaya (*hinterland*), proses pasca-panen (agroindustri pengolahan), hingga jaringan logistik pemasaran pemasaran komoditas [9]. PDRB Kabupaten Cianjur menunjukkan bahwa kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor basis paling dominan yang terus mengalami tren peningkatan nilai nominal setiap tahun, di mana pada tahun 2024 sektor ini menyumbang angka terbesar yaitu senilai 20.631,43 miliar rupiah terhadap total PDRB ADHB kabupaten. Melalui pendekatan klaster, konsep Minapolitan berupaya mengonversi dominasi sektor primer ini agar tidak sekadar berfokus pada ekstraksi bahan mentah subsisten, melainkan bermigrasi ke arah penguatan nilai tambah agroindustri kelautan lokal.

Penguatan rantai nilai perikanan dilakukan melalui pengenalan mendalam terhadap karakteristik lokal komoditas guna memandu pelaku ekonomi dalam memilih jenis kegiatan dan lokasi usaha perikanan secara optimal [12]. Secara fungsional, rantai nilai minapolitan menuntut adanya integrasi fungsional vertikal:

- a. Sektor Hulu (*Upstream*): Berfokus pada penyediaan benih, pakan, alat tangkap, jaringan es, dan BBM nelayan yang terpusat pada koridor pelabuhan.
- b. Sektor Produksi (*On-farm*): Berupa pemanfaatan ruang tambak air tawar, tambak pesisir, dan area penangkapan bebas lepas laut lepas pantai Samudra Hindia.
- c. Sektor Hilir (*Downstream*): Mencakup industrialisasi pasca-panen seperti pengalengan ikan, pengeringan, pembuatan produk turunan, cold storage, hingga unit pengepakan logistik ekspor.

2. Peran Infrastruktur Logistik dan Konektivitas Wilayah

Efisiensi rantai nilai dalam konsep kawasan Minapolitan sangat bergantung pada keandalan sistem jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta transportasi wilayah [10]. Berdasarkan analisis pergerakan ekonomi, kelancaran distribusi komoditas dari sentra produksi pesisir selatan menuju pasar regional membutuhkan dukungan infrastruktur jalan yang memadai. Jaringan jalan arteri primer dan jalan kolektor primer yang menghubungkan klaster selatan, tengah, dan utara bertindak sebagai koridor pergerakan barang dan jasa barang regional. Peningkatan kapasitas jalan ini meminimalkan biaya logistik perikanan, mencegah pembusukan komoditas tangkapan nelayan akibat waktu tempuh yang lama, serta memperkuat konektivitas inter-regional antarwilayah.

Selain transportasi darat, penguatan rantai nilai membutuhkan integrasi prasarana pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan untuk mengatur pergerakan kapal tangkap serta sirkulasi bongkar muat secara terpadu. Keberadaan simpul infrastruktur pesisir ini harus didukung secara linier oleh sistem jaringan energi dan air bersih guna menjamin operasional pabrik pengolahan es batuan dan ruang pendingin (*cold storage*). Sistem penyediaan air bersih (SPAM) dan unit distribusi air baku yang stabil merupakan elemen prasarana wajib bagi industri pengolahan hasil laut guna mempertahankan standar higienitas dan mutu keamanan pangan pasar dunia.

3. Keterkaitan Klaster Perikanan dengan Sektor Pendukung

Sesuai dengan kerangka berpikir perencanaan terpadu, keberhasilan penguatan rantai nilai kelautan di wilayah minapolitan ditentukan oleh interaksi ekosistem usaha yang melibatkan klaster industri pengolahan, sektor perdagangan besar, serta penyedia jasa pelayanan kemudahan keuangan. Dalam data PDRB Kabupaten Cianjur, sektor Perdagangan Besar dan Eceran menempati urutan kontribusi ekonomi terbesar kedua setelah sektor pertanian dengan capaian nominal sebesar 9.758,40 miliar rupiah pada tahun 2024. Melalui integrasi kawasan Minapolitan, sektor perdagangan eceran dan jasa perusahaan diarahkan untuk memfasilitasi distribusi pemasaran rantai pasok ikan secara efisien melalui simpul pasar lokal maupun terminal logistik logistik kawasan.

Hubungan inter-sektoral ini menciptakan keuntungan ekonomi aglomerasi spasial, di mana para nelayan kecil dan pelaku UMKM pengolah hasil perikanan mendapatkan kemudahan akses informasi pasar, ketersediaan tenaga kerja terampil, serta efisiensi pengadaan prasarana secara kolektif kolektif. Penguatan kelembagaan lokal berupa koperasi perikanan, kemitraan dunia usaha, dan tata kelola perizinan tata ruang usaha budidaya tambak pesisir menjadi pengikat regulasi agar roda ekonomi minapolitan berjalan seimbang. Dengan memadukan potensi kelautan, pemantapan sarana pelabuhan

perikanan, efisiensi distribusi perdagangan, dan kelestarian ekosistem pantai, rantai nilai perikanan selatan mampu ditingkatkan secara inklusif, merata, dan berkelanjutan.

D. Pengembangan Wilayah Pesisir Berbasis Mitigasi Bencana

1. Integrasi Sektor Basis dan Rantai Nilai Perikanan

Rantai nilai (*value chain*) perikanan dalam sistem Minapolitan mencakup totalitas interaksi hulu-hilir, mulai dari penyediaan input sarana produksi perikanan, aktivitas penangkapan dan budidaya (*hinterland*), proses pasca-panen (agroindustri pengolahan), hingga jaringan logistik pemasaran komoditas [9]. PDRB Kabupaten Cianjur menunjukkan bahwa kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor basis paling dominan yang terus mengalami tren peningkatan nilai nominal setiap tahun, di mana pada tahun 2024 sektor ini menyumbang angka terbesar yaitu senilai 20.631,43 miliar rupiah terhadap total PDRB ADHB kabupaten. Melalui pendekatan klaster, konsep Minapolitan berupaya mengonversi dominasi sektor primer ini agar tidak sekadar berfokus pada ekstraksi bahan mentah subsisten, melainkan bermigrasi ke arah penguatan nilai tambah agroindustri kelautan lokal.

Penguatan rantai nilai perikanan dilakukan melalui pengenalan mendalam terhadap karakteristik lokal komoditas guna memandu pelaku ekonomi dalam memilih jenis kegiatan dan lokasi usaha perikanan secara optimal. Secara fungsional, rantai nilai minapolitan menuntut adanya integrasi fungsional vertikal:

- a. Sektor Hulu (*Upstream*): Berfokus pada penyediaan benih, pakan, alat tangkap, jaringan es, dan BBM nelayan yang terpusat pada koridor pelabuhan.
- b. Sektor Produksi (*On-farm*): Berupa pemanfaatan ruang tambak air tawar, tambak pesisir, dan area penangkapan bebas lepas laut lepas pantai Samudra Hindia.
- c. Sektor Hilir (*Downstream*): Mencakup industrialisasi pasca-panen seperti pengalengan ikan, pengeringan, pembuatan produk turunan, cold storage, hingga unit pengepakan logistik ekspor.

2. Peran Infrastruktur Logistik dan Konektivitas Wilayah

Efisiensi rantai nilai dalam konsep kawasan Minapolitan sangat bergantung pada keandalan sistem jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta transportasi wilayah [11]. Berdasarkan analisis pergerakan ekonomi, kelancaran distribusi komoditas dari sentra produksi pesisir selatan menuju pasar regional membutuhkan dukungan infrastruktur jalan yang memadai. Jaringan jalan arteri primer dan jalan kolektor primer yang menghubungkan klaster selatan, tengah, dan utara bertindak sebagai koridor pergerakan barang dan jasa barang regional. Peningkatan kapasitas jalan ini meminimalkan biaya logistik perikanan, mencegah pembusukan komoditas tangkapan nelayan akibat waktu tempuh yang lama, serta memperkuat konektivitas inter-regional antarwilayah.

Selain transportasi darat, penguatan rantai nilai membutuhkan integrasi prasarana pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan untuk mengatur pergerakan kapal tangkap serta sirkulasi bongkar muat secara terpadu. Keberadaan simpul infrastruktur pesisir ini harus didukung secara linier oleh sistem jaringan energi dan air bersih guna menjamin operasional pabrik pengolahan es batuan dan ruang pendingin (*cold storage*). Sistem penyediaan air bersih (SPAM) dan unit distribusi air baku yang stabil merupakan elemen prasarana wajib bagi industri pengolahan hasil laut guna mempertahankan standar higienitas dan mutu keamanan pangan pasar dunia.

3. Keterkaitan Klaster Perikanan dengan Sektor Pendukung

Sesuai dengan kerangka berpikir perencanaan terpadu, keberhasilan penguatan rantai nilai kelautan di wilayah minapolitan ditentukan oleh interaksi ekosistem usaha yang melibatkan klaster industri pengolahan, sektor perdagangan besar, serta penyedia jasa pelayanan kemudahan keuangan. Dalam data PDRB Kabupaten Cianjur, sektor Perdagangan Besar dan Eceran menempati urutan kontribusi ekonomi terbesar kedua setelah sektor pertanian dengan capaian nominal sebesar 9.758,40 miliar rupiah pada tahun 2024. Melalui integrasi kawasan Minapolitan, sektor perdagangan eceran dan jasa perusahaan diarahkan untuk memfasilitasi distribusi pemasaran rantai pasok ikan secara efisien melalui simpul pasar lokal maupun terminal logistik kawasan.

Hubungan inter-sektoral ini menciptakan keuntungan ekonomi aglomerasi spasial, di mana para nelayan kecil dan pelaku UMKM pengolah hasil perikanan mendapatkan kemudahan akses informasi pasar, ketersediaan tenaga kerja terampil, serta efisiensi pengadaan prasarana secara kolektif kolektif. Penguatan kelembagaan lokal berupa koperasi perikanan, kemitraan dunia usaha, dan tata kelola perizinan tata ruang usaha budidaya tambak pesisir menjadi pengikat regulasi agar roda ekonomi minapolitan berjalan seimbang. Dengan memadukan potensi kelautan, pemantapan sarana pelabuhan perikanan, efisiensi distribusi perdagangan, dan kelestarian ekosistem pantai, rantai nilai perikanan selatan mampu ditingkatkan secara inklusif, merata, dan berkelanjutan berkelanjutan.

E. *State of the Art* dan Kesenjangan Kajian

Kajian pengembangan minapolitan di Indonesia umumnya menekankan pentingnya integrasi sistem produksi perikanan dengan pengolahan dan pemasaran, serta perlunya dukungan infrastruktur dan kelembagaan agar minapolitan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Di sisi lain, kajian pengembangan wilayah pesisir juga menegaskan pentingnya mitigasi bencana sebagai bagian dari perencanaan ruang karena wilayah pesisir memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana alam.

Namun, dalam konteks wilayah pesisir yang memiliki karakter ganda, yaitu sebagai sentra produksi perikanan sekaligus kawasan rawan bencana, kajian yang mengintegrasikan pengembangan minapolitan dengan strategi mitigasi bencana masih perlu diperkuat. Selain itu, minapolitan juga memerlukan keterhubungan antarwilayah agar sistem distribusi dan pemasaran berjalan efisien. Dalam konteks Kabupaten Cianjur, wilayah selatan memiliki potensi perikanan yang dominan dan ditetapkan sebagai kawasan minapolitan, namun masih menghadapi tantangan keterbatasan aksesibilitas dan kerentanan bencana pesisir. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengembangan minapolitan Cianjur Selatan menjadi penting untuk menganalisis arah pengembangan kawasan yang produktif, terintegrasi dengan pusat distribusi wilayah tengah, serta tangguh terhadap risiko bencana.



Gambar 2. Peta Kawasan Minapolitan Kabupaten Cianjur
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2026

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kuantitatif-kualitatif terintegrasi yang menyelaraskan analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan analisis statistik ekonomi wilayah. Pengumpulan data primer dilaksanakan melalui teknik wawancara terpimpin bersama perwakilan instansi daerah terkait serta observasi lapangan menggunakan *Global Positioning*



System (GPS) untuk validasi empiris di pesisir selatan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur dan survei instansi resmi, yang mencakup peta tematik berformat *Shapefile* (.shp) dari Dinas PUTR serta data numerik kependudukan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cianjur periode 2020–2025 dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Proses analisis data darat dan pesisir dibagi menjadi tiga tahapan interdisipliner utama. Struktur ruang dan konektivitas wilayah pesisir diuji melalui analisis sistem jaringan pergerakan dengan mengaplikasikan rumus *Connectivity Index* untuk mengukur indeks keterhubungan jalan, serta analisis sistem pusat permukiman menggunakan metode Skalogram dan *Marshall Centrality Index* untuk mengklasifikasikan hierarki pelayanan antara pusat minapolitan (*Minapolitan Centre*) dan distrik penyangga (*Minapolitan District*). Dari aspek ekonomi, posisi perikanan sebagai sektor basis diidentifikasi secara kuantitatif menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ), yang kemudian dievaluasi dinamika pertumbuhan riilnya melalui analisis *Shift Share* untuk memisahkan pengaruh pertumbuhan nasional, bauran industri, dan keunggulan kompetitif lokal. Pembatasan ruang dan zonasi minapolitan yang aman diselaraskan melalui analisis fisik wilayah menggunakan teknik *overlay* (tumpang susun) peta kemampuan lahan serta analisis kerentanan terhadap risiko bencana komposit seperti paparan tsunami, banjir, dan banjir bandang pantai selatan.

Sebagai tahap akhir penyusunan konsep, penelitian ini mengintegrasikan seluruh luaran data ekonomi, prasarana, dan fisik ke dalam Analisis SWOT kuantitatif-kualitatif. Melalui pembobotan (*weighting*) dan penilaian skor (*scoring*) faktor internal serta eksternal, ditentukan posisi kuadran strategi wilayah. Hasil sintesis akhir ini dirumuskan menjadi paket rekomendasi kebijakan zonasi hulu-hilir Minapolitan yang berdaya saing ekonomi, adaptif terhadap risiko perubahan iklim, serta operasional sesuai dengan arah kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW 2024-2044.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Sektor Unggulan dan Rantai Nilai Perikanan Pesisir Selatan

Berdasarkan hasil analisis ekonomi makro Kabupaten Cianjur, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor basis utama dengan kontribusi nominal terbesar terhadap total Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB). Penguatan rantai nilai kelautan di wilayah bagian selatan bertumpu pada dominasi absolut sektor pertanian-perikanan ini, yang secara nominal meningkat pesat dari tahun ke tahun.

Tabel 1. Perkembangan Nilai PDRB ADHB Kabupaten Cianjur Komoditas Utama (Miliar Rupiah), 2020–2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.645,96	16.441,35	17.507,76	18.864,37	20.631,43
2	Industri Pengolahan	3.358,80	3.585,17	3.924,20	4.243,20	4.697,83
3	Konstruksi	3.616,19	4.147,66	4.424,52	5.056,85	5.105,52
4	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	7.497,56	7.846,69	8.450,64	9.095,26	9.758,40
5	Transportasi dan Pergudangan	4.635,12	4.739,83	5.331,91	5.819,61	7.181,90
Total Produk Domestik Regional Bruto		47.535,46	50.137,67	53.988,96	58.391,22	64.403,51

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur dalam Laporan Studio 1 PWK, 2026

Data pada Tabel 1 membuktikan bahwa struktur ekonomi makro Kabupaten Cianjur dikuasai oleh aktivitas pertanian dan perikanan (20.631,43 miliar rupiah) serta ditopang oleh sektor perdagangan besar (9.758,40 miliar rupiah). Melalui implementasi Minapolitan di wilayah bagian selatan, keunggulan komparatif dari komoditas perikanan tangkap laut dan perikanan budidaya pesisir dikonversi secara struktural ke dalam klaster agroindustri pengolahan. Integrasi ini melibatkan penyediaan sarana hulu di pelabuhan, optimalisasi produksi nelayan, hingga diversifikasi industri pengolahan pasca-panen (sektor hilir) guna memacu pertumbuhan ekonomi wilayah selatan secara berkelanjutan.

2. Analisis Struktur Permukiman dan Konektivitas Ruang Minapolitan

Pengembangan kawasan kelautan menuntut pembagian peran fungsional pusat permukiman pesisir yang teratur. Berdasarkan hasil analisis sistem pusat permukiman menggunakan metode Skalogram dan Marshall, wilayah selatan diarahkan mengikuti struktur hierarki berjenjang terpadu.

Tabel 2. Deliniasi Fungsional Spasial Berjenjang Kawasan Minapolitan Cianjur Selatan

Struktur Spasial	Kecamatan Deliniasi	Karakteristik Wilayah & Luas Lahan	Infrastruktur Strategis & Fasilitas Pelayanan
Minapolitan Centre	Kecamatan Cidaun	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); Pesisir pantai; Luas: 29.800,92 Ha	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Jayanti, Rencana Terminal Khusus Megatop, Unit SPAM distribusi air baku, Terminal Cidaun.
Minapolitan District	Kecamatan Sindangbarang	Pusat Kegiatan Lokal (PKL); Konektivitas regional; Luas: 15.868,28 Ha	Pelabuhan Pengumpan Lokal Sindangbarang, PLTS Saganten & Sirnagalih, Pasar Ikan Lokal, Terminal Penumpang Penumpang.
Minapolitan District	Kecamatan Agrabinta	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); Dataran pantai aluvial; Luas: 19.640,88 Ha	Kawasan Perikanan Budidaya Tambak Pesisir, TPS3R Persampahan, Unit Terminal Angkutan tipe C.

Sumber: Hasil Analisis Spasial dan Kebijakan Peraturan daerah Kabupaten Cianjur No. 7/2024, 2026

Kecamatan Cidaun ditetapkan sebagai *Minapolitan Centre* utama karena statusnya dalam sistem perkotaan nasional sebagai PKW Cidaun-Rancabuaya serta memiliki luasan administrasi terbesar mencapai 29.800,92 hektare. Cidaun berfungsi sebagai simpul pengolahan industri makro dan logistik ekspor perikanan karena ditopang oleh PPI Jayanti. Jaringan ini diperkuat oleh Kecamatan Sindangbarang (PKL) dan Kecamatan Agrabinta (PPL) sebagai *Minapolitan District* yang mengonsolidasikan komoditas dari perdesaan.

Jaringan logistik wilayah minapolitan terhubung secara regional melalui jalur kolektor primer pantai selatan (ruas Tegalbuleud-Cidaun-Cilaki) yang memotong hambatan aksesibilitas menuju pasar Bandung maupun Jakarta.

3. Analisis Fisik Wilayah dan Kesesuaian Lahan Berbasis Mitigasi Risiko Bencana

Morfologi wilayah bagian selatan Kabupaten Cianjur dicirikan oleh bentang alam dataran rendah pantai (kemiringan lereng 0–8%) dengan variasi ketinggian didominasi kisaran 0–200 meter di atas permukaan laut. Batuan penyusun wilayah ini didominasi oleh material sedimen Formasi Bentang Atas dan Bentang Bawah dengan jenis tanah latosol subur serta kantong tanah aluvial di sepanjang pesisir. Karakteristik fisik ini menyediakan ruang ideal bagi perluasan tambak budidaya, namun di sisi lain menyimpan kerentanan bencana hidrometeorologi serta pesisir yang sangat masif akibat pengaruh perubahan iklim global.

Tabel 3. Matriks Paparan Risiko Bencana Komposit Wilayah Kelautan Cianjur Selatan

No	Kecamatan Pesisir	Bahaya Tsunami (Ha)	Bahaya Banjir Bandang (Ha)	Bahaya Banjir Genangan (Ha)	Skor Total Kerentanan	Tingkat Risiko Komposit
1	Kecamatan Agrabinta	14.941,53 (Tinggi)	2.272 (Tinggi)	1.794 (Tinggi)	7	Sedang-Tinggi
2	Kecamatan Sindangbarang	12.976,66 (Tinggi)	829 (Tinggi)	1.330 (Tinggi)	9	Tinggi
3	Kecamatan Cidaun	11.391,10 (Sedang)	2.144 (Tinggi)	1.512 (Tinggi)	8	Tinggi

Sumber: Kompilasi Data Hasil Analisis KRB dan KLHS Kabupaten Cianjur, 2026

Data paparan bencana komposit pada Tabel 3 menegaskan bahwa seluruh kecamatan inti penggerak minapolitan selatan berada dalam perimeter ancaman tinggi. Kecamatan Agrabinta mencatatkan paparan bahaya tsunami terluas mencapai 14.941,53 hektare, diikuti oleh Sindangbarang (12.976,66 hektare) dan Cidaun (11.391,10 hektare). Kerentanan lingkungan ini diperparah oleh ancaman luapan debit banjir aliran sub-DAS selatan (Sungai Cibuni dan Cilaki) yang memicu potensi paparan banjir bandang seluas 2.272 hektare di Agrabinta dan 2.144 hektare di Cidaun. Indeks kerentanan tsunami komposit menempatkan Sindangbarang dan Cidaun pada kelas risiko tinggi karena padatnya konsentrasi penduduk terpapar dan tingginya potensi kerugian aset fisik perikanan.

4. Pembahasan: Sintesis Strategi Konsep Minapolitan Berkelanjutan

Integrasi tata ruang operasional minapolitan hulu-hilir dengan kluster kerentanan fisik pesisir dirumuskan secara komprehensif melalui matriks strategi SWOT komposit. Penataan ruang kelautan di wilayah bagian selatan Kabupaten Cianjur tidak boleh dilakukan secara eksploitatif, melainkan harus menerapkan pendekatan yang adaptif serta berwawasan mitigasi bencana.

Bagan 1. Peta Konsep Alur Penataan Ruang Kawasan Minapolitan Cianjur Selatan Berkelanjutan



Bagan 1. Peta Konsep Alur Penataan Ruang Kawasan Minapolitan Cianjur Selatan Berkelanjutan

Sesuai dengan Bagan 1, implementasi konsep minapolitan selatan dijalankan melalui skema diferensiasi zonasi yang ketat. Sektor hulu perikanan budidaya tambak pesisir dikembangkan secara selektif pada wilayah kemampuan lahan tinggi di perdesaan Agrabinta dan Sindangbarang (*hinterland*) dengan memanfaatkan sistem pasokan air bersih sub-DAS. Komoditas mentah



dikonsolidasikan menuju PKL Sindangbarang sebagai pusat pengolahan menengah (*district*) sebelum didistribusikan secara massal ke *Minapolitan Centre* di PKW Cidaun guna proses ekspor industrial.

Untuk meminimalkan potensi kerugian nominal triliunan rupiah akibat ancaman tsunami dan banjir, pengembangan fisik pelabuhan serta investasi industri wajib mematuhi garis sempadan pantai perlindungan setempat seluas minimal 2.804 hektare di seluruh kabupaten. Wilayah rentan pesisir dipertahankan sebagai fungsi lindung lingkungan melalui vegetasi hutan mangrove dan sabuk hijau pantai. Strategi non-struktural diterapkan dengan membangun rute infrastruktur Sistem Jaringan Evakuasi Bencana penyeberangan, rambu evakuasi, dan EWS di sepanjang desa pesisir, serta memposisikan puskesmas dan kantor kecamatan Cidaun-Sindangbarang sebagai titik evakuasi utama. Melalui keterpaduan antara klaster ekonomi perikanan berbasis potensi lokal dengan pembatasan guna lahan adaptif bencana, konsep minapolitan selatan mampu mengakselerasi kesejahteraan masyarakat sekaligus mewujudkan ketahanan pesisir jangka panjang.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan Konsep Pengembangan Minapolitan di Wilayah Bagian Selatan Kabupaten Cianjur merupakan strategi spasial dan sektoral yang krusial untuk mengatasi disparitas ekonomi serta ketimpangan infrastruktur antarwilayah. Secara ekonomi, penguatan rantai nilai perikanan didukung penuh oleh posisi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai lapangan usaha basis paling dominan yang memberikan kontribusi nominal tertinggi pada struktur PDRB Kabupaten Cianjur, yakni mencapai 20.631,43 Miliar Rupiah. Integrasi fungsional minapolitan hulu-hilir dioperasikan melalui pembentukan struktur ruang berjenjang, dengan menetapkan Kecamatan Cidaun sebagai Pusat Minapolitan (*Minapolitan Centre*) atau simpul pertumbuhan industri makro yang didukung statusnya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Struktur ini diperkuat oleh peran Kecamatan Sindangbarang sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Kecamatan Agrabinta sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang bertindak sebagai Distrik Minapolitan (*Minapolitan District*) guna mengonsolidasikan komoditas dari perdesaan basis produksi (*hinterland*).

Meskipun wilayah selatan memiliki keunggulan komparatif berbasis sumber daya laut, analisis fisik dan lingkungan menunjukkan wilayah pesisir ini berada dalam cakupan kerentanan bencana multirisik tinggi, terutama terhadap paparan tsunami, banjir bandang muara sungai, dan banjir genangan musiman akibat dampak perubahan iklim global. Oleh karena itu, keberlanjutan investasi minapolitan selatan sangat bergantung pada kepatuhan penataan ruang terhadap batas kemampuan lahan dan regulasi kawasan lindung setempat, khususnya dengan mempertahankan batas sempadan pantai perlindungan setempat seluas minimal 2.804 hektare sebagai sabuk hijau hutan pantai. Keselarasan antara akselerasi ekonomi kelautan berbasis klaster dengan pemantapan mitigasi non-struktural seperti penyediaan koridor transportasi logistik, pemenuhan air bersih industri, dan penyiapan jalur evakuasi bencana menjadi kunci utama bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk mewujudkan pembangunan pesisir selatan yang berdaya saing tinggi, inklusif, aman, serta tangguh terhadap guncangan bencana alam sesuai mandat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW 2024-2044.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah Studio 1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sali Al-Aitaam, atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang diberikan selama proses penyusunan laporan penelitian mengenai konsep pengembangan wilayah ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai instansi pemerintah daerah terkait di Kabupaten Cianjur yang telah memfasilitasi kebutuhan data serta memberikan wawasan mendalam dalam proses penelitian. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, inspirasi, serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang perencanaan wilayah dan kota.



DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. H. B. Harmadi, *Studi Kewilayahan Dan Konsep Pengembangan Wilayah. Kebijakan Pengembangan Wilayah Dan Perkotaan*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2020.
- [2] K. Novianti Dan C. N. Syahid, "Menuju Kota Cerdas: Pelajaran Dari Konsep Smart City Yang Diterapkan Di Jakarta Dan Surabaya," Dalam *Prosiding Seminar Hari Tata Ruang*, 2016, Hal. 89.
- [3] E. F. Lubis, F. Yuliani, Dan A. Marta, "Dimensi Policy Network Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Xiii Koto Kampar, Provinsi Riau," *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 11, No. 2, Hal. 315-329, 2025.
- [4] R. Suprihardjo Dan D. Rahmawati, "Peran Masyarakat Dan Permukiman Nelayan Sebagai Dasar Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Lamongan, Studi Kasus Permukiman Minapolis Brondong Lamongan," *Tesa Arsitektur*, Vol. 12, No. 2, Hal. 129, 2014.
- [5] E. Amalia Dan W. Pangestoeti, "Perencanaan Dan Pengembangan Kampung Madong Sebagai Destinasi Minapolitan Kampung Ikan Berbasis Masyarakat: (Kajian Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif Dan Spasial)," *Jurnal Mata Pariwisata*, Vol. 2, No. 2, Hal. 41-47, 2023.
- [6] D. R. Lataena, M. Ali, Dan S. A. Ekawati, "Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan," *Jurnal Wilayah & Kota Maritim*, Vol. 7, 2019.
- [7] D. R. Lataena, M. Ali, Dan S. A. Ekawati, "Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan," *Jurnal Wilayah & Kota Maritim*, Vol. 7, 2019.
- [8] D. R. Lataena, "Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan (Studi Kasus: Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur)," Skripsi Sarjana, Univ. Hasanuddin, Makassar, Indonesia, 2019.
- [9] A. S. Royali, *Ekonomi Kepulauan Dan Maritim: Dinamika Pembangunan Berbasis Kawasan*. Jakarta: Detak Pustaka, 2025.
- [10] E. F. Lubis, F. Yuliani, Dan A. Marta, "Dimensi Policy Network Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Xiii Koto Kampar, Provinsi Riau," *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 11, No. 2, Hal. 315-329, 2025.
- [11] A. B. Wibowo, "Pengembangan Kawasan Minapolitan Berkelanjutan Berbasis Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar Di Kabupaten Magelang," Tesis Magister, Program Pascasarjana Undip, Semarang, Indonesia, 2014.
- [12] M. M. Pattinasarany Dkk., *Transformasi Perikanan Budidaya Indonesia: Menuju Akuakultur Modern Dan Berkelanjutan*. Jakarta: Kamiya Jaya Aquatic, 2026.